

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stunting, masalah umum di banyak negara, termasuk Indonesia, menimbulkan tantangan yang signifikan bagi sistem kesehatan masyarakat. Kondisi ini ditandai dengan perkembangan fisik yang terhambat akibat periode nutrisi yang tidak memadai yang berkepanjangan, seperti yang disorot oleh Apriluana & Fikawati (2017). Istilah “stunting” mengacu pada keadaan di mana tinggi anak jatuh di bawah kisaran rata-rata untuk kelompok usia mereka atau ketika mereka gagal mencapai potensi pertumbuhan penuh mereka. Seperti yang ditunjukkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia (2017), stunting terjadi ketika perawakan seseorang di bawah rata-rata standar untuk usia mereka dalam populasi umum. Tebi dkk. (2021) telah mengidentifikasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap stunting, yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok yang berbeda. Faktor-faktor ini mencakup unsur-unsur dasar seperti status ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan ibu, serta aspek menengah seperti ukuran keluarga, tinggi ibu, usia ibu saat melahirkan, dan jumlah keturunan. Selain itu, ada penentu yang lebih langsung termasuk praktik yang berkaitan dengan menyusui eksklusif, usia anak, dan risiko Berat Badan Bawah (BBLR).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), stunting berdampak pada jutaan anak secara global, terutama di negara-negara kurang berkembang, memainkan peran penting sebagai indikator signifikan kesejahteraan anak-anak dan kemajuan pembangunan nasional. Faktor-faktor yang berkontribusi

terhadap stunting meliputi nutrisi yang tidak mencukupi, kekurangan zat gizi mikro, sanitasi yang tidak memadai, akses terbatas ke perawatan kesehatan, dan berbagai faktor sosial ekonomi yang berinteraksi untuk menciptakan lingkungan yang menantang bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dampak abadi dari stunting mencakup penurunan efisiensi, peningkatan kerentanan terhadap penyakit, dan dampak merugikan pada pertumbuhan kognitif anak, yang dapat memiliki implikasi luas pada kesejahteraan masa depan dan kontribusi masyarakat mereka. Mengatasi masalah stunting sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak, menjembatani kesenjangan kesehatan, dan memastikan masa depan yang lebih menjanjikan dan sejahtera bagi generasi mendatang. Sangat penting bagi pembuat kebijakan, profesional kesehatan, dan masyarakat untuk berkolaborasi secara efektif dalam menerapkan strategi dan intervensi yang menargetkan akar penyebab stunting dan mempromosikan perkembangan anak yang holistik. Selain itu, kesadaran yang tidak memadai mengenai pentingnya diet bergizi, serta pengetahuan yang tidak memadai tentang persiapan makanan, dapat memperburuk tantangan stunting.

Masalah nutrisi stunting pada balita adalah konsekuensi dari malnutrisi kronis, suatu kondisi yang bermanifestasi selama 1000 hari pertama setelah kehidupan. Efek malnutrisi kronis biasanya menjadi jelas setelah anak mencapai usia 2 tahun, tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik mereka tetapi juga perkembangan kognitif mereka. Nutrisi yang diperoleh bayi selama periode prenatal dan melalui menyusui memainkan peran penting selama 1000

hari pertama, memberikan pengaruh abadi yang meluas hingga dewasa, berpotensi mencegah stunting jika nutrisi yang cukup disediakan. Balita, didefinisikan sebagai anak di bawah lima tahun, mencakup mereka yang berusia di bawah satu tahun juga. Namun, proses fisiologis bayi di bawah satu tahun berbeda secara signifikan dari balita yang lebih tua. Anak-anak berusia antara 1 dan 5 tahun secara bertahap beralih dari menyusui ke mengonsumsi berbagai makanan yang lebih luas saat mereka maju melalui tahap perkembangan mereka, memenuhi kebutuhan nutrisi dan pertumbuhan kognitif mereka yang berkembang.

Dalam rentang usia 1 hingga 3 tahun, balita dianggap konsumen pasif karena mereka bergantung pada pengasuh, terutama ibu, untuk menyediakan makanan mereka. Sangat penting untuk menawarkan balita beragam makanan untuk memastikan nutrisi yang tepat selama tahap perkembangan kritis ini. Orang tua harus memperhatikan kebutuhan nutrisi balita untuk mencegah dan mengatasi kekurangan segera, karena nutrisi yang tidak memadai selama periode ini dapat menyebabkan kerusakan permanen. Indikator utama malnutrisi berkepanjangan pada balita adalah pertumbuhan terhambat, khususnya kekurangan tinggi badan. Stunting pada balita sebagian besar disebabkan oleh asupan makanan yang tidak mencukupi, yang dapat dikaitkan dengan faktor-faktor seperti kelangkaan makanan, sanitasi yang buruk, dan infeksi yang mempengaruhi tubuh anak, yang menyebabkan tingkat metabolisme yang meningkat dan nafsu makan menurun. Akibatnya, kebutuhan nutrisi anak tetap tidak terpenuhi, membuat mereka sangat rentan

terhadap stunting, suatu kondisi yang dapat menghambat perkembangan dan lintasan pertumbuhan mereka secara keseluruhan, ditandai dengan kemajuan yang lambat tidak seperti anak-anak yang biasanya berkembang.

Optimalisasi peran posyandu melibatkan berbagai upaya manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan fungsinya sebagai pusat kesehatan masyarakat yang penting yang menawarkan bimbingan dan konseling pada berbagai masalah kesehatan, dengan fokus khusus pada gizi. Posyandu, juga dikenal sebagai Pos Pelayanan Terpadu, merupakan landasan Upaya Kesehatan Sumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dirancang untuk dilakukan oleh masyarakat, bagi masyarakat, dan bersama masyarakat, dalam rangka memberdayakan individu dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mengakses layanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak kecil. Peningkatan peran dan efektivitas posyandu bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah tetapi membutuhkan partisipasi aktif dari semua segmen masyarakat, termasuk relawan yang berdedikasi yang dikenal sebagai kader. Mengingat perannya yang sangat penting dalam menangani kasus-kasus stunting, posyandu berfungsi sebagai garis depan untuk memberikan layanan kesehatan penting kepada anak kecil dan memainkan peran penting dalam upaya memerangi dan menghilangkan stunting di masyarakat. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk merampingkan pelaksanaan program gizi melalui posyandu untuk secara efektif mengurangi prevalensi stunting, terutama di wilayah Desa Sendang. Dengan mengoptimalkan operasi dan dampak posyandu, kemajuan yang signifikan dapat dibuat untuk mengurangi tantangan

yang ditimbulkan oleh stunting dan meningkatkan hasil kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan studi komprehensif dengan judul khusus yang secara ringkas merangkum fokus, tujuan, dan hasil yang dimaksudkan dari upaya penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN POS GIZI PADA POSYANDU DI DESA SENDANG, KECAMATAN NGRAYUN, KABUPATEN PONOROGO”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah di uraikan Penulis menguraikan batas-batas masalah seperti yang ditunjukkan dalam informasi latar belakang sebelumnya: “Bagaimana implementasi program pelayanan gizi pada Posyandu di Desa Sendang, Kecamatan Ngrayun, Ponorogo?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana bagaimana implementasi program pelayanan gizi pada Posyandu di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun, Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini untuk menawarkan keuntungan dalam hal pengetahuan akademis bagi siswa dan masyarakat pada umumnya, yang mencakup implikasi teoritis dan praktis.:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya Secara teoritis, penelitian ini diantisipasi untuk menjadi sumber daya dasar dan berkontribusi pada pemahaman pelaksanaan program layanan gizi di Posyandu. Selain itu, diantisipasi bahwa penelitian ini akan menetapkan standar untuk penelitian masa depan dalam bidang subjek ini. Selanjutnya, peneliti bertujuan agar penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi kemajuan pengetahuan teoritis, terutama di bidang implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Untuk pemerintah daerah dapat menjadi acuan untuk pemerintah daerah khususnya Penelitian ini diharapkan dapat berperan dalam penilaian program pelayanan gizi khusus di Posyandu. Akibatnya, temuan penelitian ini diharapkan untuk menginformasikan tinjauan kebijakan yang diterapkan, dengan penulis juga membayangkan peningkatan kemanjuran program di masa depan.

E. Penegasan Istilah

Untuk meningkatkan pemahaman kerangka teoritis yang sedang diselidiki dalam upaya penelitian khusus ini, terminologi tertentu akan dijelaskan dan diuraikan dalam wacana berikutnya; penjelasan tersebut dianggap penting untuk membangun pemahaman bersama dan memfasilitasi analisis dan interpretasi yang lebih kuat dari temuan yang berasal dari penelitian ini.

a) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan mengacu pada proses dalam kebijakan publik yang menghasilkan implementasi kebijakan yang sebenarnya. George C. Edward mengidentifikasi empat faktor penting yang memainkan peran kunci dalam implementasi kebijakan, yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Kecenderungan atau perilaku, dan struktur birokrasi (Winarno, 2014). Secara praktis, implementasi kebijakan melibatkan intervensi berbagai kepentingan. Pada intinya, implementasi kebijakan berkisar pada tiga elemen penting: penetapan tujuan atau sarana kebijakan, adanya kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan, dan munculnya hasil dari kegiatan tersebut. Sederhananya, implementasi kebijakan dapat didefinisikan sebagai tindakan melaksanakan atau melaksanakan kebijakan.

b) Pelayanan Gizi

Inisiatif Stunting Handling Nutrition Services adalah program baru yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi untuk mencegah dan mengurangi prevalensi stunting di kalangan anak-anak di Indonesia. Program ini dilaksanakan melalui Posyandu, fasilitas kesehatan berbasis masyarakat yang hadir di berbagai daerah pedesaan dan perkotaan. Menargetkan anak-anak yang rentan terhadap stunting, ini mencakup beberapa kegiatan penting, termasuk menawarkan bimbingan nutrisi kepada pengasuh anak. Panduan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif dan praktis tentang diet seimbang, kebutuhan nutrisi anak, dan strategi untuk memastikan mereka menerima

nutrisi yang memadai untuk perkembangan yang optimal. Dalam kerangka ini, Posyandu memainkan peran penting sebagai pusat penjangkauan dan dukungan keluarga.

F. Landasan Teori

1. Implementasi Kebijakan

Konsep Implementasi, sederhananya, memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Setelah perumusan dan perumusan, kebijakan yang ditetapkan dikecualikan selama fase implementasi. Menurut Rian Nugroho dalam Public Policy, pentingnya implementasi kebijakan tidak bisa dilebih-lebihkan. Nugroho menekankan bahwa kontrol aktual atas implementasi mewakili sisa 20% dari proses kebijakan. Implementasi kebijakan berdiri sebagai tahap penting dalam kebijakan publik karena secara langsung berdampak pada hasil akhir dari kebijakan itu sendiri pasca-implementasi.

Odoji menggarisbawahi pentingnya implementasi kebijakan, menunjukkan bahwa itu melampaui pembuatan kebijakan dan perumusan kebijakan. Tanpa implementasi, kebijakan tetap menjadi mimpi idealis belaka atau rencana yang dibuat dengan baik yang diturunkan ke arsip. Seperti yang disorot oleh A. H. Nugroho dan Setiyono pada tahun 2015, esensi implementasi kebijakan tidak dapat dirusak.

Pakar kebijakan publik telah memperkenalkan berbagai model implementasi, termasuk model klasik yang diartikulasikan oleh Van Meter Van Horn. Model ini menggarisbawahi bahwa implementasi kebijakan melibatkan tindakan pemerintah yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan yang diuraikan

dalam tahap perencanaan. Terlepas dari signifikansinya, implementasi kebijakan menimbulkan tantangan karena keadaan yang tidak terduga di lapangan dapat muncul, berdampak pada pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan di atas, tahap implementasi memiliki tingkat kepentingan yang signifikan, bisa dibilang melampaui tahap perencanaan. Namun, hal ini tidak merusak peran penting perencanaan dalam studi kebijakan, karena fase implementasi tetap menjadi komponen penting. Dalam mengeksplorasi implementasi 'program layanan gizi di Desa Sendang, para peneliti telah memanfaatkan model implementasi kebijakan Edward. Model ini menyoroti empat faktor penting yang integral dalam implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor ini mencakup aspek-aspek seperti bagaimana kebijakan dikomunikasikan, alokasi sumber daya, kualitas pelaksana, dan struktur organisasi pembuat kebijakan. Selain itu, ditekankan bahwa keberhasilan keputusan pembuat kebijakan sangat bergantung pada implementasi kebijakan mereka yang efektif.

Dari informasi yang disebutkan di atas, jelas bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari kebijakan publik, karena menentukan keberhasilan keseluruhan kebijakan itu sendiri. Efektivitas suatu kebijakan secara langsung terkait dengan seberapa baik kebijakan itu diterapkan. Proses ini tidak hanya melibatkan perumusan kebijakan tetapi juga pelaksanaannya, dengan berbagai tingkat kewenangan bekerja sama untuk meningkatkan proses implementasi.

Seperti yang ditunjukkan oleh Turhundayani dan Halim et al., implementasi kebijakan publik memainkan peran penting dalam menghubungkan tujuan kebijakan dengan hasil yang dimaksudkan. Inisiatif kebijakan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa hal itu mencapai hasil yang diinginkan. Wahab (2011) mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan fundamental, yang biasanya disajikan sebagai arahan tetapi juga dapat mengambil bentuk perintah eksekutif legislatif penting atau putusan yudisial. Edward III mengembangkan model yang mencakup komponen seperti Komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi untuk memandu implementasi kebijakan. Elemen-elemen ini saling bergantung dan harus ditangani secara bersamaan. Model ini membantu memecah proses implementasi menjadi elemen-elemen penting. Mulyono (2009) menekankan sifat dinamis dari implementasi kebijakan, dengan banyak faktor yang berinteraksi satu sama lain. Keterkaitan keempat komponen tersebut sangat penting untuk realisasi kebijakan yang efektif.

a. Komunikasi

Pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan dalam masyarakat bergantung pada pemahaman menyeluruh tentang tugas-tugas oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Sangat penting untuk mengartikulasikan tujuan dan sasaran kebijakan dengan jelas kepada penerima yang dituju untuk meminimalkan kemungkinan salah tafsir selama proses implementasi. Ambiguitas atau kurangnya kesadaran di antara kelompok

sasaran mengenai tujuan dan sasaran kebijakan berpotensi menyebabkan perlawanan.

b. Sumberdaya

Sementara kebijakan sebelumnya telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, efektivitas pelaksanaannya bergantung pada keberadaan sumber daya yang cukup. Sumber daya ini mencakup elemen manusia, yang berkaitan dengan kemahiran pembuat kebijakan, dan elemen keuangan. Kehadiran sumber daya ini sangat penting dalam menjamin kemanjuran implementasi kebijakan. Dengan tidak adanya dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan tersebut hanya akan ada sebagai pernyataan di atas kertas, kurang kelayakan dalam istilah praktis.

c. Disposisi atau Sikap Disposisi

Konsep ini mengacu pada kualitas dan atribut bawaan yang dimiliki oleh individu yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan, seperti dedikasi, integritas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Diterima secara luas bahwa karakteristik disposisional positif pelaksana memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, selaras dengan tujuan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Diyakini bahwa pelaksana dengan disposisi yang menguntungkan mampu melaksanakan kebijakan secara efisien dan sejalan dengan niat awal pembuat kebijakan. Sebaliknya, ketidakcocokan disposisi atau perspektif antara pelaksana dan pembuat kebijakan dapat menghambat efektivitas proses implementasi kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Kerangka kerja organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan memainkan peran penting dalam implementasinya. Standar Operasional Prosedur (SOP), yang memberikan panduan kepada individu yang melaksanakan tanggung jawab mereka, adalah elemen penting dari kerangka kerja ini. Struktur organisasi yang terlalu rumit dapat mengakibatkan terciptanya rantai pengawasan yang panjang dan pengembangan birokrasi, yang ditandai dengan prosedur birokrasi yang kompleks dan berbelit-belit. Pada akhirnya, ini dapat menghambat kemampuan organisasi untuk memodifikasi mode operasinya (Roring et al., 2021).

2. Pengertian Posyandu

Posyandu, yang dikenal sebagai Pos Layanan Terpadu, yang dikenal sebagai Upaya Kesehatan Sumber Daya Masyarakat (UKBM), diciptakan secara kolaboratif oleh anggota masyarakat dengan tujuan memberdayakan mereka dengan menawarkan infrastruktur penting yang diperlukan untuk memfasilitasi penyediaan layanan kesehatan yang melayani kebutuhan ibu, bayi, dan anak kecil. Inisiatif ini berfungsi sebagai platform penting untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan yang disesuaikan dan sistem dukungan. Peningkatan peran dan efektivitas posyandu tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi melibatkan seluruh sektor masyarakat, termasuk tenaga

kesehatan masyarakat. Depkes Indonesia mendefinisikan Pos Layanan Terpadu (Posyandu) sebagai inisiatif layanan kesehatan yang beroperasi dalam area perawatan kesehatan tertentu. Program ini merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan mengurangi Tingkat Kematian Bayi (IMR), Tingkat Kelahiran Mentah (CBR), dan Tingkat Kematian Ibu (MMR). Keberhasilan penurunan angka IMR, CBR, dan MMR dikaitkan dengan implementasi program terpadu yang efektif, yang mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan posyandu sebagai hak dasar kesehatan. Dalam rangka memajukan kesehatan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam posyandu sangat penting dan dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen kesehatan (Wicaksana, 2020).

Layanan kesehatan yang diberikan di Posyandu meliputi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), Penanganan Imunisasi dan Diare (P2M), dan Nutrisi (Penimbangan Balita). Fokus utama Posyandu adalah pada ibu hamil, ibu menyusui, pasangan di masa reproduksi mereka (PUS), dan anak kecil. Peran penting kader dalam organisasi Posyandu melampaui sekadar memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat; mereka juga berfungsi sebagai influencer dan motivator masyarakat, mendorong individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan Posyandu dan mengadopsi kebiasaan gaya hidup bersih dan sehat.

Posyandu memberikan banyak manfaat bagi ibu, balita, dan masyarakat pada umumnya. Manfaat ini meliputi: Pastikan akses mudah ke informasi dan layanan kesehatan untuk ibu, bayi, dan anak kecil. Penting untuk memantau

perkembangan anak kecil untuk mencegah masalah seperti kekurangan gizi, gizi yang tidak memadai, dan pertumbuhan terhambat. Bayi dan balita harus menerima asupan vitamin A yang cukup dan imunisasi lengkap. Wanita hamil harus melacak berat badan mereka, menerima suplemen zat besi (Fe), vaksinasi Tetanus Toxoid (TT), dan ibu pascapersalinan harus menerima suplemen vitamin A dan zat besi (Fe). Menetapkan program penyuluhan Kesehatan yang berfokus pada Kesehatan Ibu dan Anak untuk segera mengidentifikasi dan merujuk bayi, balita, wanita hamil, ibu pascapersalinan, dan ibu menyusui dengan kelainan apa pun ke fasilitas kesehatan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah komponen penting dari penelitian yang memandu proses pengukuran variabel, sedangkan definisi operatif berfungsi sebagai pengetahuan ilmiah yang berharga bagi peneliti lain yang menggunakan variabel yang sama. Indikator yang digunakan diuraikan sebagai berikut: Pada intinya, implementasi kebijakan berkisar pada tiga elemen penting:

1. Penetapan tujuan atau sarana kebijakan,
2. Adanya kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan, dan
3. Munculnya hasil dari kegiatan tersebut

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian deskriptif, yang difokuskan pada penggambaran fenomena dan peristiwa yang ada. Selain itu,

penelitian deskriptif berfungsi sebagai metode pemecahan masalah yang melibatkan eksplorasi dan mewakili berbagai subjek dan objek yang diselidiki (seperti individu, lembaga masyarakat, dan lain-lain) pada saat ini berdasarkan bukti yang dapat diamati. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan wawasan komprehensif tentang masalah yang sedang dipelajari. Dalam hal ini, peneliti mencari data terperinci tentang keterlibatan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Teknik Penentuan Daerah Penelitian

Lokasi Situs penelitian berfungsi sebagai area yang ditunjuk untuk pengumpulan, analisis, dan keterlibatan informasi yang berkaitan dengan subjek studi. Investigasi dilakukan dalam pengaturan khusus ini. Desa Sendang, Kecamatan Ngayun, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini dilakukan di desa Sendang, Kecamatan Ngayun, dikarenakan lokasi yang dipilih mungkin memiliki aksesibilitas yang baik bagi populasi sasaran, seperti daerah perkotaan atau pedesaan yang mudah dijangkau oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak balita yang membutuhkan layanan gizi.

3. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer mengacu pada data yang diperoleh secara langsung melalui investigasi lapangan langsung. Menurut Kuncoro, data primer biasanya dikumpulkan melalui survei lapangan menggunakan teknik pengumpulan data asli. Dalam studi khusus ini, data primer akan dikumpulkan melalui

wawancara tatap muka dengan informan dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti selama upaya penelitian mereka di lingkungan Desa Sandang, yang terletak di Kecamatan Ngayun, Kabupaten Ponorogo.

b. Data Sekunder

Data sekunder biasanya merupakan kombinasi dari sumber data primer, yang mencakup berbagai bentuk data fisik seperti dokumen, jurnal, buku, media cetak, dan media elektronik. Data gabungan ini berfungsi sebagai sumber daya berharga bagi peneliti yang ingin membangun pengetahuan yang ada atau melakukan analisis lebih lanjut di bidang tertentu. Misalnya, dalam konteks studi tentang layanan gizi lingkungan di Desa Sandang, Kecamatan Ngayun, Kabupaten Ponorogo, memanfaatkan temuan penelitian sebelumnya dapat memberikan wawasan dan konteks penting untuk penelitian saat ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan melakukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data. berupa studi lapangan (*field reseach*)

a. Observasi

Observasi berfungsi sebagai metode agregasi data yang digunakan untuk memperoleh data penelitian melalui pengamatan dan persepsi (Bungin, 2015). Ini melibatkan peneliti yang secara langsung menyaksikan dan memahami kejadian, yang kemudian didokumentasikan secara subyektif. Akibatnya, penelitian ini mengadopsi pengamatan terstruktur, yang direncanakan dengan cermat, untuk merinci apa yang diamati, serta waktu

dan lokasi pengamatan. Melalui pemanfaatan metode pengumpulan data observasi, seseorang dapat memastikan kondisi yang berlaku di wilayah penelitian, khususnya Desa Sandang. Ini termasuk mengevaluasi sejauh mana Pemerintah Desa memberlakukan kebijakannya, membantu peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yang akurat dan andal.

b. Wawancara

Wawancara umumnya digambarkan sebagai pertukaran interaktif pertanyaan dan jawaban antara dua atau lebih peserta dalam pengaturan fisik. Dalam hal metodologi yang digunakan selama wawancara, ini dapat dicirikan sebagai percakapan yang disengaja antara dua aktor utama: pewawancara, yang bertanggung jawab untuk mengajukan pertanyaan, dan orang yang diwawancarai, yang ditugaskan memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan. Wawancara atau percakapan dilakukan dengan tujuan khusus mengumpulkan informasi tentang peran pemerintah desa di lingkungan Desa Sandang, Kecamatan Ngayun, Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk meningkatkan bukti dan data yang dikumpulkan di lapangan dan untuk mendapatkan pemahaman tentang topik melalui materi tertulis. Suatu ini dapat didefinisikan sebagai catatan tertulis apa pun yang berkaitan dengan kejadian masa lalu, baik disiapkan atau tidak disiapkan untuk tujuan penelitian (Ghony & Almanshur, 2012). Selain itu, ini berfungsi sebagai ringkasan data atau log catatan komprehensif peneliti, termasuk gambar atau foto yang menguatkan temuan penelitian. Pendekatan

ini memerlukan pemeriksaan berbagai catatan formal, laporan, aturan, dan catatan sejarah yang disimpan di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata untuk mengidentifikasi bagian yang memberikan dukungan teoritis untuk temuan penelitian. Selain itu, para sarjana memiliki pilihan untuk menggunakan dokumentasi visual seperti foto atau video saat melakukan penyelidikan di tempat mereka. Dengan memeriksa dokumentasi, informasi berharga dapat diekstraksi dari sumber-sumber seperti surat, buku harian, arsip, notulen rapat, kenang-kenangan, log aktivitas, dan banyak lagi.

5. Teknik Penentuan Informan

Proses pemilihan informan untuk studi penelitian menggunakan teknik sampling tujuan, seperti yang diuraikan oleh Sugianto dalam teks Memahami Penelitian Kualitatif, di mana itu didefinisikan sebagai “metode pemilihan sumber data sesuai dengan kriteria tertentu.”. Salah satu kriteria tersebut adalah memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan paling relevan tentang materi pelajaran, atau mereka yang memegang posisi otoritas yang memfasilitasi eksplorasi fenomena atau situasi sosial oleh peneliti” (Sugiyono, 2017). Dalam studi khusus ini, informan adalah individu yang diidentifikasi oleh peneliti sebagai yang paling mampu memberikan informasi penting untuk penelitian. Para peneliti telah menetapkan subjek penelitian sebagai sumber yang diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif, khususnya mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam

penyediaan layanan gizi di Desa Sandang, Kecamatan Ngayun, Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian, subjek penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Seksi Pelayanan Desa
- b. Bidan Desa Sandang
- c. Kader Pendamping posyandu
- d. Ibu Balita program gizi (Masyarakat)

6. Teknik Analisa Data

Dalam hal ini, para sarjana menggunakan metodologi analisis data deskriptif kualitatif, di mana analisis data memerlukan organisasi dan pemeriksaan sistematis dari semua data yang diperoleh. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode yang menjelaskan dan secara komprehensif menggambarkan data yang dikumpulkan mengenai keadaan saat ini (Moleong, 2021). Milles dan Huberman menguraikan fase keterlibatan dalam analisis data kualitatif, khususnya: pengurangan data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

1) Pengumpulan Data

Proses pengolahan dan persiapan data untuk analisis meliputi tugas-tugas seperti menyalin wawancara, memindai materi, memasukkan data lapangan, dan mengkategorikan dan mengatur data ke dalam berbagai format berdasarkan sumber informasi.

2) Reduksi data

Pengurangan data adalah metode analisis yang mengkategorikan, memandu, menghilangkan informasi yang tidak relevan, dan mengatur data

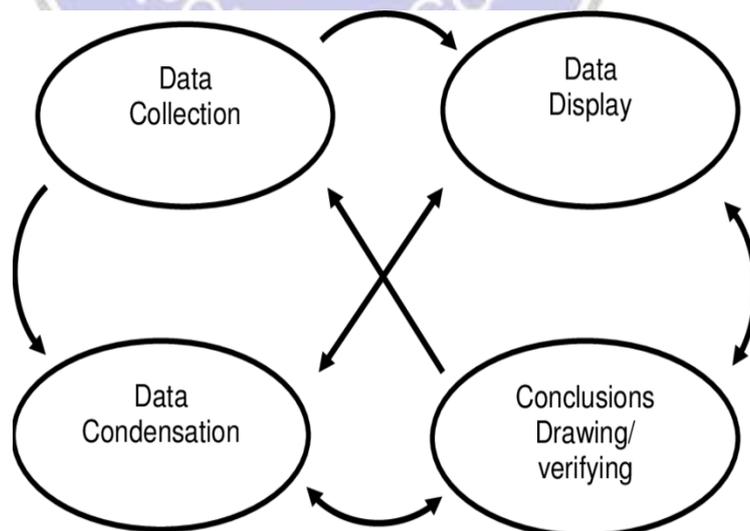
yang telah diringkas untuk menawarkan representasi yang lebih jelas dari hasil pengamatan dalam berbagai kategori.

3) Penyajian Data

Representasi data melibatkan pemeriksaan data melalui berbagai format seperti matriks, jaringan, bagan, atau grafik. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya disajikan melalui deskripsi ringkas, tabel, dan eksplorasi hubungan antara berbagai kategori.

4) Penarikan Kesimpulan

Fase kesimpulan melibatkan perumusan deduksi akhir dan validasi. Pengurangan awal yang diajukan dianggap awal dan dapat dimodifikasi tanpa adanya bukti substantif untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan yang berasal dari penelitian kualitatif memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dikembangkan sejak awal..



Gambar 3.1

**Komponen Analisis Data Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J.
(2014)**

7. Teknik Keabsahan Data

Tes validitas dalam penelitian kualitatif mencakup validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan objektivitas (Sugiyono, 2017). Dalam studi saat ini, para peneliti menggunakan tes kredibilitas untuk memeriksa validitas data. Jenis tes ini melibatkan triangulasi, yang memerlukan pemeriksaan silang data dari berbagai sumber dan pada titik waktu yang berbeda. Tiga jenis triangulasi yang digunakan untuk memastikan validitas data meliputi triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, para sarjana memilih triangulasi sumber. Triangulasi sumber, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2017), memerlukan konfirmasi keakuratan data dengan referensi silang informasi yang dikumpulkan dari berbagai asal. Kredibilitas data subjek dalam penelitian ini akan diverifikasi melalui triangulasi sumber.